



KABUPATEN LAMONGAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


## LKJP TAHUN 2025

## DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026



 [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)

 Jl. Kusuma Bangsa no. 32 Lamongan

 [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang diberikan pada kami sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKPJ Dinas Sosial Kabupaten Lamongan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, pada setiap akhir tahun anggaran. LKPJ ini disusun berdasarkan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dan pengelolaan dana dari setiap kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Demikian laporan kami, harapan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dibidang Sosial Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**  
**GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.E., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800117 200312 1 003

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	2
1.3 DATA UMUM DAERAH.....	5
1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH.....	6
1.3.2 JUMLAH PENDUDUK.....	6
1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK.....	6
1.3.4 JUMLAH PNS.....	7
1.4 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN.....	8
1.5 REALISASI BELANJA MENURUT BELANJA.....	8
1.6 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	8
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>9</b>
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI</b> .....	<b>11</b>
<b>KEWENANGAN DAERAH</b> .....	<b>11</b>
3.1 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH:.....	11
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar : .....	29
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar : .....	32
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan :.....	32
3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :.....	33
3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan : .....	33
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	34
3.3 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	49
3.4 Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.....	50
3.5 Indikator Kinerja Utama.....	54
3.5 PENGHARGAAN DAN INOVASI.....	55
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> ... <b>62</b>	
4.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :.....	62
4.2 Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan :.....	62
4.3 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :.....	62

**BAB V PENUTUP .....65**

**BAB I  
PENDAHULUAN****1.1 DASAR HUKUM**

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Lamongan;
11. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 73 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (ASTA CITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030, adalah:

### **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna pembangunan daerah yang bertujuan mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan keunggulan Lamongan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan fokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi berbasis potensi unggulan (seperti ikan lele/soto), serta pemerataan pembangunan demi keadilan bagi masyarakat, seperti yang diusung oleh kepemimpinan baru di Lamongan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya** adalah upaya aktif pemerintah untuk mencapai tujuan
2. **Kejayaan Lamongan** adalah Kondisi Lamongan yang maju, unggul, masyhur, dan sejahtera lahir batin, dalam pembangunan SDM, infrastruktur, budaya, dan ekonomi..
3. **Berkelanjutan** adalah Pembangunan yang berlanjut dan tidak hanya sesaat, dengan pendekatan inklusif dan berorientasi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2030 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman.
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan.
- Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan.
- Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, dan Partisipatif dalam Pembangunan.
- Tujuan : Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat.
- Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2030. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi IV yaitu **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN.”**. Fokus Misi ke IV yaitu menitikberatkan pada upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga nilai-nilai religiutas, budaya dan kerukunan antar warga.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabiliitasi Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat** dengan indikator **Persentase Penduduk Miskin** dan **Indeks Kesalehan Sosial**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030 yang menguraikan mulai dari

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

MISI 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN.					
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MERATA DAN STABILITASI WILAYAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENINGKAT					
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			INDEKS KESALEHAN SOSIAL		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Meningkatnya Stabilitas Kewajiban untuk Kerukunan Masyarakat	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat
Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai Stabilitas	Nilai Toleransi	Indeks Pemberdayaan Gender NTP dan Indeks Daya Beli	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai Solidaritas
> Tenagakerja > Sosial	Ketrentaman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Urusan Penunjang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bakesbangpol)	> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak > Pertanian >Perdagangan	Kebudayaan	Sosial

Gambar 4.1.4 Cascading Misi IV Pada RPJMD Tahun 2025-2030

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Sosial telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi IV RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD Misi IV yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni yang pertama **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial”** dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial dan sasaran RPJMD misi IV yang kedua **“Meningkatnya Solidaritas Masyarakat”** dengan indikator Nilai Solidaritas. Sehingga tujuan dari Dinas Sosial pendukung Sasaran RPJMD Misi IV adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial dan Solidaritas Masyarakat”** dengan indikator Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) dan Persentase Nilai Solidaritas.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait

dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	1. Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial	Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1. Nilai SAKIP 2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 3. Nilai Manajemen Resiko
		Nilai Solidaritas	3. Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

### 1.3 DATA UMUM DAERAH

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km<sup>2</sup>, atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan, yang meliputi 474 Desa, 12 Kelurahan dan 1.431 Dusun.

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan termasuk wilayah pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

### **1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH**

Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada jalur Pantai Utara yang menghubungkan Kabupaten /Kota di wilayah Utara Jawa Timur. Kabupaten Lamongan berada dalam perlintasan jalur arteri primer Surabaya – Lamongan – Tuban hingga Jawa Tengah dan jalan provinsi Mojokerto – Lamongan. Ibukota Kabupaten Lamongan berjarak 44,8 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur.

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu :

1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan Daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Maduran, Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.
4. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bertempat di Jalan Kusuma Bangsa No.32 Lamongan.

### **1.3.2 JUMLAH PENDUDUK**

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2025 (semester I) sebesar 1.370.318 jiwa terdiri dari laki-laki 685.625 jiwa dan Perempuan 684.693 jiwa.

### **1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya

dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Secara demografi jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan.

Perbandingan jumlah penduduk tahun 2024 dengan tahun 2025, pada tahun 2024 jumlah penduduk sebesar 1.367.503 jiwa dan pada tahun 2025 (Semester I) sebesar 1.370.318 jiwa ada kenaikan sebesar 2.815 jiwa.

#### 1.3.4 JUMLAH PNS

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didukung oleh 50 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan Magister (S2). Dari sisi personil, terdapat 4 bidang dan 1 Sekretariat dimana ada 1 Kepala dinas, 1 Sekretaris, 4 Kabid, 3 Kasubag di Sekretariat, 6 Pejabat Fungsional, 3 Staf PNS, 6 staf CPNS dan 26 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JMLH	PANGKAT / GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	4	Penata (III/c) Pembina (IV/a)	4	S.2	4	
4	Kasubag/JFT	9	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S.2	1	
				6	S.1	6	
			Penata (III/c)	1	S.1	1	
5	Staf	9	Penata Muda (III/b)	3	S.1	3	
			Penata Muda (III/a)	6	S.1	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>	

**1.4 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN**

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bukan merupakan Dinas penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

**1.5 REALISASI BELANJA MENURUT BELANJA**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 , adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>I.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>21.385.936.307,-</b>	<b>20.363.507.749,-</b>	
1.	<b><u>Belanja Operasi</u></b>	<b>21.381.516.307,-</b>	<b>20.359.300.849,-</b>	
	a. Belanja Pegawai	3.813.762.007,-	3.377.375.489,-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.440.854.300,-	13.917.025.360,-	
	c. Belanja Hibah	20.000.000,-	0,-	
	d. Belanja Bantuan Sosial	3.106.900.000,-	3.064.900.000,-	
2.	<b><u>Belanja Modal</u></b>	<b>4.420.000,-</b>	<b>4.206.900,-</b>	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.420.000,-	4.206.900,-	

**1.6 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN**

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak menangani pembiayaan.

**BAB II  
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**

Urusan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Permasalahan sosial bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan, hal ini dikarenakan semua langsung bersentuhan dengan masyarakat. Perubahan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di tahun-tahun yang sedang berjalan dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Kebijakan yang dihasilkan harus akurat, cermat, dan tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa implikasi terhadap semakin mendesaknya upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Sehingga pada akhirnya permasalahan-permasalahan kemiskinan yang muncul akan banyak direspon, diputuskan, dan dilaksanakan secara cepat dan efektif oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu dan banyak tergantung pada instruksi dari pemerintah pusat. Dengan kewenangan daerah yang semakin besar tersebut, Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis bagi

upaya menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten lamongan memulihkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk meningkatkan infrastruktur dan Pembangunan ekonomi yang ada di Lamongan. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memulihkan ekonomi masyarakat melalui 4 bidang yang ada di dinas sosial yaitu bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan dan jaminan sosial yang saling berkaitan dan telah terintegrasi dengan kementerian sosial dan juga dinas sosial provinsi jawa timur. Upaya dinas sosial dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan, pelayanan bansos dan hibah.

Berikut tabel perubahan penjabaran anggaran belanja daerah di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan :

NO.	URAIAN	JUMLAH APBD 2025 (Rp)	JUMLAH APBD – P 2025 (Rp)	KET.
I.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>21.383.614.358,-</b>	<b>21.385.936.307,-</b>	
1.	<b><u>Belanja Operasi</u></b>	<b>21.364.648.858,-</b>	<b>21.381.516.307,-</b>	
	e. Belanja Pegawai	3.472.159.758,-	3.813.762.007,-	
	f. Belanja Barang dan Jasa	14.785.589.100,-	14.440.854.300,-	
	g. Belanja Hibah	0,-	20.000.000,-	
	h. Belanja Bantuan Sosial	3.106.900.000,-	3.106.900.000,-	
2.	<b><u>Belanja Modal</u></b>	<b>18.965.500,-</b>	<b>4.206.900,-</b>	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.965.500,-	4.206.900,-	

**BAB III  
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH****3.1 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH:**

Sebagai penunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 7 Program (1 program rutin dan 6 program teknis) yang didukung 13 Kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan teknis) dan 50 Sub Kegiatan (19 sub kegiatan rutin dan 31 sub kegiatan teknis).

## DINSOS KAB. LAMONGAN

Tabel 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	83,34	89,53			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi terkait Berharap pada kegiatan peningkatan kemampuan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sehingga permasalahan yang terjadi tidak terulang ditahun berikut telah ditindak lanjuti dengan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi secara rutin dengan TKSK</li> <li>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan TKSK.</li> </ol> </li> <li>- Rekomendasi terkait ikut serta dalam proses Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sehingga alokasi anggaran tepat sasaran sudah ditindak lanjuti dengan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan rutin kepada LKS</li> <li>2. Sosialisasi Permensos nomor 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Verifikasi dan Validasi data anak calon penerima bantuan sosial</li> </ol> </li> <li>- Rekomendasi terkait Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan sehingga angka kemiskinan Lamongan dapat selalu menurun telah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan program yang bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, salah satunya ada program BLT DBHCHT (Bantuan Langaung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) bagi buruh petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Terbukti dengan koordinasi dan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan telah dilakukan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian,</li> </ul>
2			Peningkatan akurasi DTKS melalui verifikasi dan validasi secara berkala	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,81%	88,02%			
3			Peningkatan Kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

	bagi PPKS						
4	Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan		
5	Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,815	88,02%		
6	Peningkatan pemberdayaan bagi PPKS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/bulan	50 Orang		
7	Optimalisasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi Masyarakat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
8	Pengembangan Mutu dan Kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan social	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan		
9	Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PPKS	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,81%	88,02%		
10	Menguatkan budaya gotong-royong dan tolong-menolong	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket		
11		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket		
12		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
13		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket		

Kecamatan, Bank Jatim dan MPS. selain itu Dinas Sosial juga sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kemiskinan, dengan langkah sebagai berikut : 1. Program YSS (Yakin Semua Sejahtera) 2. Program Kemiskinan Ekstrem (KE) 3. Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP)

- Rekomendasi terkait Percepatan pembangunan shelter untuk penanganan rehabilitasi sosial telah ditindak lanjuti dengan penganggaran untuk pemeliharaan shelter di tahun anggaran 2026.
- Rekomendasi terkait Pemutakhiran DTKS bersumber dari data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Harus Berani Ambil sikap yang Tegas untuk Mengambil Potret Kemiskinan yang ada di kabupaten Lamongan Seiring DTSEN diaktifkan. Memotret Kondisi Kemiskinan menggunakan Lembaga independent yang tidak terlibat konflik kepentingan seperti halnya DTKS yang melibatkan perangkat Desa (RT-RW-Kasun-Kepala Desa) yang sampai hari ini tidak lepas dari konflik kepentingan baik politik maupun keluarga telah ditindak lanjuti bahwasannya Pemutakhiran DTKS bersumber dari data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Harus Berani Ambil sikap yang Tegas untuk Mengambil Potret Kemiskinan yang ada di kabupaten Lamongan Seiring DTSEN diaktifkan. Memotret Kondisi Kemiskinan menggunakan Lembaga independent yang tidak terlibat konflik kepentingan seperti halnya DTKS yang melibatkan perangkat Desa (RT-RW-Kasun-Kepala Desa) yang sampai hari ini tidak lepas dari konflik kepentingan baik politik maupun keluarga.
- Rekomendasi terkait Pengoptimalan Tugas

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,81%	88,02%		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,81%	88,02%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,81%	88,02%		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	36 Unit	36 Unit		

dan Fungsi Dinsos dalam penyaluran Bansos Kementerian Sosial dengan mengordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyaluran bansos. Dengan demikian bansos bisa sampai ketangan KPM tanpa kurang 1 rupiahpun karena sistem kemensos terkait bansos sudah menggunakan rekening pribadi KPM. Dan berdasarkan permensos 4 tahun 2023 bansos sudah tidak ada pemaketan, pengerahan membeli barang paket kepada warung warung yang sudah ditata baik oleh pemerintah setempat maupun oleh pendamping bansos (TKSK) telah ditindaklanjuti bahwasannya sesuai Permensos nomor 4 Tahun 2023 penyaluran bansos langsung masuk rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bisa langsung di manfaatkan sesuai program yang telah ditentukan oleh kementerian, semua pihak (Perangkat Desa, Kecamatan, Pendamping baik PKH maupun TKSK), ikut mengawasi dalam program pemerintah terkait bansos.

- Rekomendasi terkait Mengharap kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menindak Tegas siapapun yang bermain dan mempermainkan Bansos yang harusnya menjadi hak penuh KPM tetapi dimanipulasi oleh oknumoknum tertentu baik itu diluar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan telah ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi ke seluruh 27 kecamatan dan melakukan pengawasan secara sampling penyaluran bansos kepada masyarakat.
- Rekomendasi terkait Mengharap Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan Sense Of Crisis terhadap potret kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamongan. Mengingat jumlah penduduk perempuan di kabupaten lamongan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, maka bisa dipastikan korban dari kemiskinan itu

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

		Dipelihara				
25		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	
26		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang meningkat Kapasitasnya	100%	100%	
27		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.85%	4.85%	
28		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	
29		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	25 Orang	
30		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	40 Lembaga	
31		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	100%	
32		PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN	Presentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.85%	4.85%	

sendiri adalah kaum perempuan telah ditindak lanjuti bahwasannya dalam rangka untuk penanggulangan dan membantu korban kekerasan perempuan, dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dan modal usaha

1. Yakin Semua Sejahtera (YSS)
2. Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem (KE)
3. KIP Jawara

- Rekomendasi terkait Mengharap kepada Dinas Sosial untuk tidak hanya duduk dibalik meja, tetapi turun temui warga KPM dan lihat proses penyaluran bansos yang Dimana- mana 27 kecamatan 474 Desa di Kabupaten Lamongan mayoritas di manipulasi dalam bentuk paket yang tidak sesuai dengan jumlah rupiah dari kemosos, serta barang/ paket sembako yang tidak sesuai standart telah ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring dan pengawasan sampling pada waktu penyaluran bansos dan juga kami berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk melakukan pengawasan pada waktu penyaluran bansos sehingga apa yang diterima KPM sesuai dengan bansos yang diberikan pemerintah.
- Rekomendasi terkait Mengoptimalkan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial telah ditindak lanjuti dengan :
  1. Mengusulkan calon Penerima Manfaat (Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rentan Sosial Ekonomi) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
  2. Mengusulkan calon Penerima Manfaat Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP PUTRI JAWARA) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Rekomendasi terkait Mengoptimalkan fasilitasi pengembangan ekonomi melalui bantuan kemiskinan ekstrem berupa bantuan modal usaha telah ditindak lanjuti

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

33		ASAL						melakukan pemberian bantuan modal usaha telah disalurkan melalui : 1. YSS (Yakin Semua Sejahtera) yaitu bantuan modal untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 2. Kemiskinan Ekstrem (KE) yaitu bantuan modal usaha diberikan kepada kepala keluarga yang masuk dalam data P3KE - Rekomendasi terkait Harap Pro Aktif dan di fasilitasi terhadap penerima BPJS terblokir telah ditindak lanjuti dengan memberikan pelayanan dan pendampingan untuk pendaftaran ulang/reaktivasi baik melalui KIS APBD maupun APBN dengan syarat sudah masuk DTKS. - Rekomendasi terkait Harmonisasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait BPJS harap ditingkatkan telah ditindak lanjuti dengan membuat rekam surat keterangan tidak mampu berdasarkan keterangan dari desa yang mengetahui camat
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang			
34		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapat pelayanan & direhabilitasi	100%	100%			
35		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Presentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.85%	4.85%			
36		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	670 Orang	670 Orang			
37		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang			
38		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang			
39		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	40 Orang			

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

		Kewenangan Kabupaten/Kota				
40	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang		
41	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang		
42	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang		
43	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	27 Orang		
44	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	27 Orang		
45	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	8 Orang		
46	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	26 Orang		

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

47	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	14 Orang		
48	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlayani Perlindungan & Jaminan Sosial	100%	100%		
49	PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.85%	4.85%		
50	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	654426 Orang	654426 Orang		
51	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	600000 Keluarga	563508 Keluarga		
52	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44819 Keluarga	61524 Keluarga		
53	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	184 Orang	173 Orang		
54	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%		
55	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%		
56	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang		

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

57	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang	57 Orang		
58	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit		
59	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang		
60	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang		
61	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100 %		
62	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung		
63	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang		
64	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 Unit	1 TMP		

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

65			PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	1 TMP		
66			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	75 Makam	75 Makam		
67			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah pengamanan taman makam pahlawan yang dilakukan; jumlah pelaksanaan upacara	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)		

**CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KAB.LAMONGAN TAHUN 2025**

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR		SATUAN TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TH.2025	REALISASI TH.2025	CAPAIAN TH.2025	KETERANGAN
Tujuan :										
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial dan Solidaritas Masyarakat	1.	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	<p>INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL merupakan penilaian indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial yang diterjemahkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 UU 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) melalui tiga dimensi Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial dan Keberdayaan Ekonomi.</p> <p>Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 10 hingga 100, dengan intepretasi sebagai berikut :</p> <p>Tidak Sejahtera 10-20, Berkembang 21-40, Maju 41-60, inklusif 61-80 dan sejahtera diatas 81.</p>	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} = \sum_{i=1}^3 Dimensi_i \times Bobot_{Dimensi_i} = (Dimensi_1 \times Bobot_{Dimensi_1}) + (Dimensi_2 \times Bobot_{Dimensi_2}) + (Dimensi_3 \times Bobot_{Dimensi_3})$	56,85	56,93	65,80	115,58	

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

				Posisi Kabupaten Lamongan di angka 56,85.						
				Nilai Ikesos Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP).						
	2.	Nilai Solidaritas	Nilai	Pada prinsipnya Nilai Solidaritas untuk mengetahui hubungan antar individu dan kelompok dengan di dukung nilai-nilai moral dan gotong royong pada lingkungan masyarakat.	Menggunakan variabel yang terdapat didalam Indeks Kesalehan Sosial/variabel baru yang disesuaikan dengan lokalistik daerah untuk mendukung Indeks Kesalehan Sosial	90,57	90,80	90,85	100,06	
<u>Sasaran :</u>										
Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial		Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin	Persen (%)	PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / Jumlah PPKS desil 1 s/d 5 x 100%	N/A	$(603.483/725.309) \times 100 = 83,20$	$(791.807/725.309) \times 100 = 109,17$	$(109,17/83,20) \times 100 = 131,21$	DTSen desil 1-5 seluruh bansos anggaran APBD Kab., APBD Prov., APBN, Dekon. (PKH plus 2.805, PKH reguler 60.042, BPNT/sembako 160.415, kemiskinan ekstim 2.346, JKN 563.508, Jawara 200, ASPD 203, BLT sembako kel. 80, rosella 61, YSS 32, LKSA 1450, sandang 45, permakanan lansia 620)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1.	Nilai SAKIP	Nilai	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	88,02	88,12			Menunggu Rilis Inspektorat

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

	2.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah pada aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah	88,02	88,32	'89,53	101,37	
	3.	Nilai Manajemen Resiko	Nilai	Tingkat kematangan penyelenggaraan manajemen risiko perangkat daerah berdasarkan aspek-aspek dalam penilaian manajemen risiko internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	85,82	85,92			Menunggu Rilis Inspektorat
Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial		Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen (%)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari PSM, TKSK, Forum LKS, Karangtaruna dan Tagana yang diberdayakan sehingga berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial / jumlah keseluruhan PSKS x 100%	$(451/451) \times 100 = 100$	$(451/451) \times 100 = 100$	$(426/426) \times 100 = 100$	$(100/100) \times 100 = 100$	Jumlah PSKS 2025 yang bersertifikat
Program :										
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen (%)	PPKS yang mendapat bantuan sosial.	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota x 100%	N/A	$(601.713/725.309) \times 100 = 82,96$	$(786.770/725.309) \times 100 = 108,47$	$(108,47/82,96) \times 100 = 130,75$	DTSEN desil 1-5 seluruh bansos anggaran APBD Kab., APBD Prov., APBN, Dekon. (PKH plus 2.805, PKH reguler 60.042, BPNT/sembako 160.415, JKN 563.508)

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

	2.	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen (%)	PPKS yang mendapat pemberdayaan sosial ekonomi untuk bisa hidup mandiri	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi / Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi x 100%	N/A	$(1.770/619.566) \times 100 = 0,29$	$(2719/619.566) \times 100 = 0,44$	$(0,44/0,29) \times 100 = 151,72$	DTSEN data desil 1-4 seluruh bansos pemberdayaan. anggaran APBD Kab., APBD Prov., APBN, Dekon. (YSS 32, Rosella 61, sembako kelurah 80, jawara 200, KEMISKINAN EKSTRIM 2346
Program Rehabilitasi Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Penyandang disabilitas terlantar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanan, sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%		$(203/4.720) \times 100 = 4,30$	$(210/4.720) \times 100 = 4,45$	$(210/203) \times 100 = 103,45$	
	2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Anak terlantar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%		$1.504/78.113) \times 100 = 1,93$	$(1.528/78.113) \times 100 = 1,96$	$(1,96/1,93) \times 100 = 101,55$	

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

	3.	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Lansia terlanjar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanan, sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah lanjut usia terlanjar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlanjar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%		$(2.544/112.850) \times 100 = 2,25$	$(2552/112.850) \times 100 = 2,26$	$(2,26/2,25) \times 100 = 100,44$	
	4.	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	gelandangan pengemis yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/bukti dokumen kependudukan, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah gelandangan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%		$(52/52) \times 100 = 100$	$(58/52) \times 100 = 111,53$	$(111,53/100) \times 100 = 111,53$	
	5.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%		$(196/2.226) \times 100 = 8,81$	N/A (BELUM TERLKAS ANA)		
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Korban Tindak Kekerasan Warga Negara Migran yang Tertangani	Persen (%)	Korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang mendapat penanganan yaitu fasilitasi pemulangan	Jumlah korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang tertangani / Jumlah korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang ada x 100%		$(50/50) \times 100 = 100$	$(57/50) \times 100 = 114$	$(114/100) \times 100 = 114$	

**DINSOS KAB. LAMONGAN**

Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen (%)	PSKS TKSK, PSM , FORUM LKS, KARANGTARUNA yang mendapat pembinaan	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan dan diberdayakan / Jumlah PSKS yang ada x 100%	$(426/426) \times 100 = 100$	$(426/426) \times 100 = 100$	$(100/100) \times 100 = 100$	
	Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen (%)	LKS yang memiliki izin operasional (Tanda Pendaftaran)	Jumlah LKS yang memiliki izin operasional (Tanda Pendaftaran) / Jumlah LKS yang ada x 100%	$40/40 \times 100 = 100$	$40/40 \times 100 = 100$	$(100/100) \times 100 = 100$	
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen (%)	Penanganan bencana alam dan sosial baik pra maupun pasca bencana	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota x 100%	$(262/262) \times 100 = 100$	$(262/262) \times 100 = 100$	$(100/100) \times 100 = 100$	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen (%)	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik / Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%	$1/1 \times 100 = 100$	$1/1 \times 100 = 100$	$(100/100) \times 100 = 100$	

- Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan sosial adalah sebagai berikut :
  - Capaian kinerja tujuan tahun 2025 pada indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) menunjukkan angka 115,58 atau **Sangat Baik** dengan realisasi 65,80 melampaui target yang ditetapkan sebesar 56,93, bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan angka naik 0,54% artinya semakin tinggi realisasinya berarti persentase penurunan PPKS semakin cepat (progress positif). Hal ini terbukti bahwa jumlah PPKS yang tertangani semakin menurun jumlahnya yaitu tahun 2024 sebanyak 106.001 jiwa dan pada tahun 2025 menurun 99.004 jiwa.

**- Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 :**

NO	JENIS PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH
1	Anak-anak Rentan : 1. Balita terlantar 2. Anak terlantar 3. Anak berhadapan dengan hukum 4. Anak difabel 5. Anak korban tindak kekerasan 6. Anak jalanan 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus	- <b>1.528</b> <b>19</b> 188 - 8 -
2	Difabel (mereka yang menyandang disabilitas)	4.515
3	Lansia Terlantar (mereka lanjut usia yang terlantar)	<b>2.552</b>
4	Berpendapatan Rendah : 1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Pemulung	<b>20</b> <b>46</b> -
5	Korban Bencana (mereka yang menjadi korban bencana alam/non alam dan bencana sosial)	187
6	Afirmasis Khusus (Komunitas Adat Terpencil/KAT)	-
7	Warga Binaan (mereka bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAP) NAPITER)	-
8	Korban Kekerasan : 1. Korban tindak kekerasan 2. Korban trafficking 3. Pekerja migran bermasalah sosial	- - -
9	Korban NAPZA dan HIV/AIDS (mereka yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS)	<b>209</b>
10	Bermasalah sosial : 1. Kelompok Minoritas 2. Keluarga bermasalah sosial psikologis	- 15.150
11	Perempuan rentan : 1. Perempuan yang rawan ekonomi 2. Tuna susila	232 -
12	Fakir Miskin (mereka yang masuk dalam kategori miskin)	74.350
	<b>JUMLAH</b>	<b>99.004</b>

**REKAPITULASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)  
TAHUN 2025**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	30
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
4	Penyuluh Sosial	-
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40
6	Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK)	21
7	Karang Taruna	96
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	47
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-
10	Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	-
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-
12	Keluarga Pioner	-
13	SDM PKH	190
	<b>JUMLAH</b>	<b>426</b>

**3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :**

Dinas Sosial Kab. Lamongan dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Rehabilitasi Sosial, melalui :**

Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Permakanan;
- 1.2 Penyediaan Sandang;
- 1.3 Penyediaan Alat Bantu;
- 1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- 1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- 1.7 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
- 1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- 1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 1.10 Pembelian Layanan Kedaruratan;
- 1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- 1.12 Pemberian Pelayanan Rujukan.

**2. Program Penanganan Bencana, melalui :**

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 2.1 Penyediaan Makanan;
- 2.2 Penyediaan Sandang;
- 2.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- 2.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- 2.5 Pelayanan Dukungan Psikososial.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kab. Lamongan sebagaimana tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan  
Tahun 2025**

No	Indikator	Mutu Pelayanan	Jumlah	Total Keseluruhan
	<b>Total Data SPM Th.2025</b>			<b>4.610</b>
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggandisabilitas Terlantar di luar panti	1. Layanan Data dan Pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan pembekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyanggandisabilitas terlantar 9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/ bukti kepemilikan NIK 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 13. Layanan rujukan	17 16 15 14 16 18 14 19 19 14 18 14 16 14	<b>210</b>
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanann reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan perbekalam kesehatan di lura panti	20 4 1454 6 4 4	<b>1528</b>

		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	4	
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	6	
		8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	7	
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8	
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	
		12. Layanan rujukan		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	60	<b>2552</b>
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	80	
		3. Penyediaan permakanan	2052	
		4. Penyediaan sandang	45	
		5. Penyediaan alat bantu	1	
		6. Penyediaan pembekalan kesehatan	95	
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	5	
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	60	
		9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	28	
		10. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	2	
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga	85	
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35	
		13. Layanan rujukan	4	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	2	<b>58</b>
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	
		3. Penyediaan permakanan	1	
		4. Penyediaan sandang	1	

		5. Penyediaan pembekalan kesehatan	2	
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	1 2	
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2	
		8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan katu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	1	
		9. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	17	
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga	20 6	
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		
		12. Layanan rujukan		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan tempat penampungan 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Pelayanan dukungan psikososial	100 57 1 30 75	<b>262</b>

**3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :**

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, melalui :

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan :

Sub Kegiatan :1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

**3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan :**

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui :

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan :

- Sub Kegiatan : 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;  
2. Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;  
4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

#### **3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :**

1. Program Pemberdayaan Sosial, melalui :

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan :

- Sub Kegiatan :1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;  
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;  
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;  
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, melalui :

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

3. Program Penanganan Bencana, melalui :

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna Bencana.

#### **3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  1. Pengadaan Mebel;
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

### **3.1 REALISASI ANGGARAN**

Program dan Kegiatan yang terealisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten

---

---

Lamongan dalam rangka pengembangan bidang sosial pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.21.385.936.307,- dan realisasi sebesar Rp.20.383.507.749,- atau 95,22% dan Capaian kinerja 2025 sebesar 131,21% dengan realisasi kinerja 109,17% dari target 83,20%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	DINAS SOSIAL	<b>21.385.936.307,-</b>	<b>20.383.507.749,-</b>	<b>95,22%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>4.618.276.207,-</b>	<b>4.102.902.260,-</b>	<b>88,84%</b>
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>75.496.000,-</b>	<b>73.365.000,-</b>	97,18%
1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.743.800,-	8.743.800,-	100%
1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.752.200,-	64.621.200,-	96,81%
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>3.854.924.807,-</b>	<b>3.418.538.289,-</b>	<b>88,68%</b>
1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.813.762.007,-	3.377.375.489,-	88,56%
1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.937.700,-	13.937.700,-	100%
1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.225.100,-	27.225.100,-	100%
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>94.402.900,-</b>	<b>90.754.540,-</b>	<b>96,14%</b>
1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.840.300,-	11.051.400,-	93,34%
1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.589.800,-	11.409.500,-	98,44
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.568.300,-	22.061.068,-	97,75
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,-	7.878.860,-	98,49%
1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,-	8.160.000,-	81,60%
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.404.500,-	30.193.712,-	99,31%
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>4.420.000,-</b>	<b>4.206.900,-</b>	<b>95,18%</b>
1.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.420.000,-	4.206.900,-	95,18%
1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>449.404.900,-</b>	<b>403.270.581,-</b>	<b>89,73%</b>
1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,-	93.270.726,-	79,72%
1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.398.900,-	9.282.480,-	98,76%

1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.006.000,-	300.717.375,-	93,10%
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>139.627.600,-</b>	<b>112.766.950,-</b>	<b>80,76%</b>
1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.007.600,-	79.978.100,-	80,76
1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.620.000,-	13.295.850,-	97,62%
1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,-	19.493.000,-	97,47%
2	Program Pemberdayaan Sosial	<b>3.235.514.900,-</b>	<b>3.190.907.626,-</b>	<b>98,62%</b>
2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<b>3.235.514.900,-</b>	<b>3.190.907.626,-</b>	<b>98,62%</b>
2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.150.000,-	13.078.750,-	99,46%
2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	187.215.400,-	167.310.400,-	89,37%
2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.035.149.500,-	3.010.518.476,-	99,19%
2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	-
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<b>10.000.000,-</b>	<b>10.000.000,-</b>	<b>100%</b>
3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>10.000.000,-</b>	<b>10.000.000,-</b>	<b>100%</b>
3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
4	Program Rehabilitas Sosial	<b>238.009.500,-</b>	<b>235.062.196,-</b>	<b>98,76%</b>
4.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>238.009.500,-</b>	<b>235.062.196,-</b>	<b>98,76%</b>
4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	144.942.000,-	143.494.706,-	99,00%
4.2.01.02	Penyediaan Sandang	22.581.000,-	22.320.000,-	98,84%
4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	10.488.500,-	9.438.290,-	89,99%

## DINSOS KAB. LAMONGAN

4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21.741.000,-	21.741.000,-	100%
4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.580.000,-	4.513.100,-	99,54%
4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.236.000,-	6.114.100,-	98,05%
4.2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	4.250.000,-	4.250.000,-	100%
4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.291.000,-	1.291.000,-	100%
4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.579.000,-	4.579.000,-	100%
4.2.01.10	Pembelian Layanan Kedaruratan	6.960.000,-	6.960.000,-	100%
4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.041.000,-	8.041.000,-	100%
4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	2.320.000,-	2.320.000,-	100%
<b>5</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>12.999.341.700,-</b>	<b>12.556.613.077,-</b>	<b>96,59%</b>
5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.999.341.700,-	12.556.613.077,-	96,59%
5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	69.424.400,-	62.646.400,-	90,24%
5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.051.000,-	12.051.000,-	100,00%
5.2.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	12.418.880.100,-	12.017.929.477,-	96,77%
5.2.02.04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	498.986.200,-	463.986.200,-	92,99%
<b>6</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>107.320.000,-</b>	<b>100.365.040,-</b>	<b>93,52%</b>
6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.000.000,-	87.695.040,-	92,90%
6.2.01.01	Penyediaan Makanan	37.200.000,-	34.777.240	93,49%
6.2.01.02	Penyediaan Sandang	36.920.000	36.375.900,-	98,53%
6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.180.000,-	703.500,-	16,83%
6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.000.000,-	9.738.400,-	97,38%
6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.100.000,-	6.100.000,-	100,00%
6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	12.920.000,-	12.670.000,-	98,07%
6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5.120.000,-	5.090.000,-	99,41%
6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	7.800.000,-	7.580.000,-	97,18%
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>177.474.000,-</b>	<b>167.657.550,-</b>	<b>94,47%</b>

7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	177.474.000,-	167.657.550,-	94,47%
7.2.01.01	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-
7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.000.000,-	8.745.000,-	87,45%
7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	167.474.000,-	158.912.550,-	94,89%

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.4.618.276.207,- dan realisasi sebesar Rp.4.102.902.260,- atau 88,84% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.496.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.73.365.000,- atau 97,18% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.743.800,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.743.800,- atau 100,00% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan.
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.66.752.200,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.64.621.200,- atau 96,81% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan serta honor pejabat pengadaan yang ditiadakan.
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.854.924.807,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.418.538.289,- atau 88,68% fisik

sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.813.762.007,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.377.375.489,- atau 88,68% fisik sebesar 100%.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.13.937.700,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.937.700,- atau 100% fisik sebesar 100%.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.225.100,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.27.225.100,- atau 100% fisik sebesar 100%.
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.94.402.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.90.754.540,- atau 96,14% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.840.300,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.11.051.400,- atau 93,34% fisik sebesar 100%.
  2. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.589.800,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.11.409.500,- atau 98,44% fisik sebesar 100%.
  3. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.568.300,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.061.068,- atau 97,75% fisik sebesar 100%.
  4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan

- 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.878.860,- atau 98,49% fisik sebesar 100%.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.160.000,- atau 81,60% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
  6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.404.500,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.193.712,- atau 99,31% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.420.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.206.900,- atau 95,18% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Pengadaan mebel, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.420.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.206.900,- atau 95,18% fisik sebesar 100%.
- e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.449.404.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.403.270.581,- atau 89,73% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp.117.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.93.270.726,- atau 79,72% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.398.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan

- 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.282.480,- atau 98,76% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.323.006.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.300.717.375,- atau 93,10% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , dengan alokasi dana sebesar Rp.139.627.600,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.112.766.950,- atau 80,76% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.102.782.100,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.83.202.600,- atau 80,95% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.13.620.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.295.850,- atau 97,62%% fisik 100%.
  3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.493.000,- atau 97,47% fisik sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial , dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.3.235.514.900,- dan realisasi sebesar Rp.3.190.907.626,- atau 98,62% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
- ❖ Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.235.514.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.190.907.626,- atau 98,62% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.13.150.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.078.750,- atau 99,46% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melakukan pembinaan terhadap 30 orang PSM.
  2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.187.215.400,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan berupa operasionalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.167.310.400,- atau 89,37% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan pembinaan terhadap 21 orang TKSK.
  3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.0, adapun realisasi keuangan sebesar 0 atau 0% fisik sebesar 100%.
  4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.035.149.500,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.010.518.476,- atau 99,19% fisik sebesar 100%. Kegiatannya bansos permakanan untuk penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 40 LKSA atau 1.450 anak.
  5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan alokasi dana sebesar Rp.0,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0%.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

❖ Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% yaitu penanganan pada 50 orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan. Mengingat pada Sub Kegiatan tersebut merupakan kondisi *Insidentil* berdasarkan laporan Kepolisian. bantuan transportasi pada orang terlantar, kecopetan dan kehabisan bekal dengan berdasarkan laporan dari kepolisian.

4) Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.238.009.500,-, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.235.062.196,- atau 98,76% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

❖ Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.238.009.500,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.235.062.196,- atau 98,76% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.144.942.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.143.494.706,- atau 99,00% fisik sebesar 100% berupa prioritas Bupati Bansos sembako pada Lansia. Adapun jumlahnya 670 Lansia.
2. Penyediaan Sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.581.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.320.000,- atau 98,84% fisik sebesar 100% berupa prioritas Bupati Bansos sandang berupa peralatan ibadah pada anak asuh keluarga

- miskin. Adapun jumlahnya 25 anak.
3. Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.488.500,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.438.290,- atau 89,99% fisik sebesar 100% berupa bansos alat bantu kursi roda pada 2 disabilitas.
  4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.21.741.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.21.741.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa mempertemukan kembali ke keluarga Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).
  5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.580.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.513.100,- atau 99,54% fisik sebesar 100%.
  6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.236.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.114.100,- atau 98,05% fisik sebesar 100%.
  7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.250.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.250.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam pengurusan NIK/KTP, KK, akta nikah, akta lahir.
  8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.291.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1291.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pemberian pendampingan bagi PPKS terutama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke layanan pendidikan atau LKS dan ke faskes kesehatan.
  9. Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi dana sebesar

- Rp.4.579.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.579.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa respon kasus baik dari masyarakat/kepolisian/kasus viral.
10. Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.960.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.960.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa memberikan fasilitas pemakaman untuk orang terlantar yang tidak punya identitas (contoh : kecelakaan).
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.041.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.041.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa mencari/menelusuri alamat keluarga PPKS yang terjaring razia dengan bekerjasama dengan Disdukpencapil.
12. Pemberian Layanan Rujukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.320.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.320.000,- atau 100% fisik sebesar 100% berupa pemberian rekomendasi bagi PPKS (disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, Anak berhadapan dengan hukum) ke UPT Provinsi.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.12.999.341.700,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.12.556.613.077,- atau 96,59% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.999.341.700,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.12.556.613.077,- atau 96,59% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.69.424.400,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.62.646.400,- atau 90,24% fisik sebesar 100%.

2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.051.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.051.000,- atau 100,00% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.418.880.100,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.017.929.477,- atau 96,77% fisik sebesar 100% berupa operasional PKH.
4. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.498.986.200,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.463.986.200,- atau 92,99% fisik sebesar 100% meliputi :
  - a. Prioritas Bupati Program Yakin Semua Sejahtera (YSS) difokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Kepala Rumah Tangga Perempuan Kurang Sejahtera (KRTPKS) yang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Program YSS diprioritaskan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Kurang Sejahtera (KRTPKS) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang dilakukan secara bertahap. Bantuan berupa Uang sebagai Modal Usaha pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP/Janda Produktif) supaya biasa mandiri dalam menghidupi keluarganya. Adapun jumlah penerima bansos program YSS sebanyak 32 KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan).
  - b. Prioritas Bupati Program ROSELA merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Kab. Lamongan yang dilaksanakan dalam rangka pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi warga miskin lansia agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam situasi daya beli masyarakat yang cenderung melemah akibat inflasi serta meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian penerima bansos ringan beban hidupnya. Bantuan berupa makanan siap makan, sasaran Lansia. Jumlah Penerima Bansos ROSELA sebanyak 72 orang di 4 Kecamatan di Kabupaten

Lamongan yaitu Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Laren.

- c. Prioritas Bupati Program BLT Sembako Daerah diperuntukan untuk warga Miskin Kelurahan yang belum tersentuh bantuan (Data Penerima Bansos berdasarkan DTKS). Bantuan berupa Sembako. Jumlah penerima BLT sembako Daerah sebanyak 80 orang di 12 Kelurahan Kecamatan Lamongan
- 6) Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.107.320.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.365.040,- atau 93,52% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.94.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.87.695.040,- atau 92,90% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan makanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.200.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.34.777.240,- atau 93,49% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%. Adapun fisik 100% tersebut merupakan prioritas Bupati Basocana (bantuan sosial bencana) berupa sembako bagi korban bencana yang tidak tercover bantuan Cadangan Beras Bencana (contoh : kebakaran/ banjir).
    2. Penyediaan sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.36.920.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.36.375.900,- atau 98,53% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%. Adapun fisik 100% tersebut merupakan prioritas Bupati Basocana (bantuan sosial bencana) berupa sandang bagi korban bencana yang tidak tercover bantuan Cadangan Beras Bencana (contoh : kebakaran/ banjir).
    3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.180.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.703.500,- atau 16,83% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.

4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.738.400,- atau 97,38% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
5. Pelayanan dukungan psikososial, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.100.000, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.100.000,- atau 100% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.920.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.12.670.000,- atau 98,07 % sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
  1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.120.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.090.000,- atau 99,41% fisik sebesar 100%.
  2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.800.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.580.000,- atau 97,18% fisik sebesar 100%.
- 7). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.177.474.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.167.657.550,- atau 94,47% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan:

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.177.474.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.167.657.550,- atau 94,47% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

  1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, tidak ada anggaran dikarenakan di alokasikan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.745.000,- atau 87,45% fisik sebesar 100%.
3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.167.474,000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 2 kali upacara Hari Pahlawan dan HKSAN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.158.912.550,- atau 94,89% fisik sebesar 100%.

### 3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan keputusan atau Tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Dinas Sosial	Bantuan Sosial (Program Prioritas) untuk Lanjut Usia (Lansia)	Kepbup Lamongan Nomor 100.3.3.2/58/KPTS/413.013/2025	dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup Lansia di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial melalui Program Sejahtera Lanjut Usia (ROSELA)
2	Dinas Sosial	Bantuan Langsung Tunai Sembako Daerah	Kepbup Lamongan Nomor 100.3.3.3/113/KPTS.412.013/2025	dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Sembako Daerah
3	Dinas Sosial	Bantuan Sosial (Program Prioritas) Yakin Semua Sejahtera (YSS)	Kepbup Lamongan Nomor 100.3.3.3/138/KPTS.412.013/2025	dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pencapaian kemandirian Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) kurang sejahtera, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				sosial melalui program Yakin Semua Sejahtera
4	Dinas Sosial	Bantuan Langsung Tunai	Kepbup Lamongan Nomor 100.3.3.3/205/KPTS.412.013/2025	dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat, maka perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lain di wilayah Kabupaten Lamongan
5	Dinas Sosial	Bantuan sosial kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Kepbup Lamongan Nomor 100.3.3.3/53/KPTS.412.013/2025	dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemulihan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian khususnya bagi lembaga/yayasan yang peduli terhadap kualitas pendidikan dan kelangsungan hidup masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yang berada dibawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

### 3.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya yang dituangkan dalam format sebagai berikut :

**REKOMENDASI ATAS KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
<b>DINAS SOSIAL</b>			

1	Berharap pada kegiatan peningkatan kemampuan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sehingga permasalahan yang terjadi tidak terulang ditahun berikut	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi secara rutin dengan TKSK</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan TKSK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan kesadaran TKSK dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi</li> <li>mengetahui tingkat kinerja TKSK</li> </ol>
2	ikut serta dalam proses Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sehingga alokasi anggaran tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan rutin kepada LKS</li> <li>Sosialisasi Permensos nomor 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>Verifikasi dan Validasi data anak calon penerima bantuan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pengurus/pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</li> <li>tujuan daripada verifikasi dan validasi LKS adalah untuk memastikan terpenuhinya syarat penerbitan izin operasional (surat tanda pendaftaran) kepada lembaga tersebut sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2024</li> <li>memastikan bantuan sosial dengan aturan yang berlaku (sesuai permendagri nomor 77 tahun 2020) bahwa bantuan diberikan kepada LKSA (anak penghuni LKS) dalam rangka untuk memastikan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar anak di LKS tersebut</li> </ol>
3	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan sehingga angka kemiskinan Lamongan dapat selalu menurun	<p>kemiskinan kabupaten Lamongan agar menurun, banyak beberapa program yang bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, salah satunya ada program BLT DBHCHT (Bantuan Langaung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) bagi buruh petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Terbukti dengan koordinasi dan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan telah dilakukan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kecamatan, Bank Jatim dan MPS. selain itu Dinas Sosial juga sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kemiskinan, dengan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program YSS (Yakin Semua Sejahtera)</li> <li>Program Kemiskinan Ekstrem (KE)</li> <li>Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP)</li> </ol>	untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan dikerjakan bersama lintas sektor.
4	Percepatan pembangunan shelter untuk penanganan rehabilitasi sosial	telah dianggarkan di tahun 2026 untuk pembangunan (pemeliharaan) shelter di Dinas Sosial	terselesaikannya penanganan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis
5	Pemutakhiran DTKS bersumber dari data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Harus Berani Ambil sikap yang Tegas untuk Mengambil Potret Kemiskinan yang ada di kabupaten Lamongan Seiring DTSEN diaktifkan. Memotret Kondisi Kemiskinan menggunakan Lembaga independent yang tidak terlibat konflik kepentingan seperti halnya DTKS yang melibatkan perangkat Desa (RT-RW-Kasun-Kepala Desa) yang sampai hari ini tidak lepas dari konflik kepentingan baik politik maupun keluarga	C	Program tepat sasaran.

6	Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Dinsos dalam penyaluran Bansos Kementerian Sosial dengan mengordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyaluran bansos. Dengan demikian bansos bisa sampai ketangan KPM tanpa kurang 1 rupiahpun karena sistem kemensos terkait bansos sudah menggunakan rekening pribadi KPM. Dan berdasarkan permensos 4 tahun 2023 bansos sudah tidak ada pemaketan, pengerahan membeli barang paket kepada warung warung yang sudah ditata baik oleh pemerintah setempat maupun oleh pendamping bansos (TKSK)	sesuai Permensos nomor 4 Tahun 2023 penyaluran bansos langsung masuk rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bisa langsung di manfaatkan sesuai program yang telah ditentukan oleh kementerian, semua pihak (Perangkat Desa, Kecamatan, Pendamping baik PKH maupun TKSK), ikut mengawasi dalam program pemerintah terkait bansos.	Bansos tepat program dan tepat sasaran
7.	Mengharap kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menindak Tegas siapapun yang bermain dan mempermainkan Bansos yang harusnya menjadi hak penuh KPM tetapi dimanipulasi oleh oknumoknum tertentu baik itu diluar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan	Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi ke seluruh 27 kecamatan dan melakukan pengawasan secara sampling penyaluran bansos kepada masyarakat	Program tepat sasaran
8.	Mengharap Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan Sense Of Crisis terhadap potret kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamongan. Mengingat jumlah penduduk perempuan di kabupaten lamongan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, maka bisa dipastikan korban dari kemiskinan itu sendiri adalah kaum perempuan	dalam rangka untuk penanggulangan dan membantu korban kekerasan perempuan, dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dan modal usaha 1. Yakin Semua Sejahtera (YSS) 2. Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem (KE) 3. KIP Jawara	menurunnya tingkat kemiskinan dengan cara memberdayakan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
9.	Mengharap kepada Dinas Sosial untuk tidak hanya duduk dibalik meja, tetapi turun temui warga KPM dan lihat proses penyaluran bansos yang Dimana- mana 27 kecamatan 474 Desa di Kabupaten Lamongan mayoritas di manipulasi dalam bentuk paket yang tidak sesuai dengan jumlah rupiah dari kemensos, serta barang/ paket sembako yang tidak sesuai standart	Dinas Sosial sudah melakukan monitoring dan pengawasan sampling pada waktu penyaluran bansos dan juga kami berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk melakukan pengawasan pada waktu penyaluran bansos sehingga apa yang diterima KPM sesuai dengan bansos yang diberikan pemerintah	program tepat sasaran dan sesuai dengan besaran yang disalurkan
10.	Mengoptimalkan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial	tindak lanjut : 1. Mengusulkan calon Penerima Manfaat (Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rentan Sosial Ekonomi) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2. Mengusulkan calon Penerima Manfaat Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP PUTRI JAWARA) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	1. Menambah modal usaha yang akan dirintis maupun yang sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga  2. Menambah modal usaha yang akan dirintis maupun yang sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga
11.	Mengoptimalkan fasilitasi pengembangan ekonomi melalui bantuan kemiskinan ekstrem berupa bantuan modal usaha	bansos pemberian bantuan modal usaha telah disalurkan melalui : 1. YSS (Yakin Semua Sejahtera) yaitu bantuan modal untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) 2. Kemiskinan Ekstrem (KE) yaitu bantuan modal usaha diberikan kepada kepala keluarga yang masuk dalam data P3KE	masyarakat miskin berkurang dan mandiri

12.	Harap Pro Aktif dan di fasilitasi terhadap penerima BPJS terblokir	Dinas Sosial telah memberikan pelayanan dan pendampingan untuk pendaftaran ulang/reaktivasi baik melalui KIS APBD maupun APBN dengan syarat sudah masuk DTKS	agar KIS tersebut bisa dipergunakan kembali (aktif)
13.	Harmonisasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait BPJS harap ditingkatkan	membuat rekom surat keterangan tidak mampu berdasarkan keterangan dari desa yang mengetahui camat	agar masyarakat segera tertangani

3.4 Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$(\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun} / \text{jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}) \times 100\%$	4,85	%	Kepala Dinas
		Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	$(\text{Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan dan diberdayakan} / \text{Jumlah PSKS yang ada}) \times 100\%$	100	%	
		Prosentase korban tindak kekerasan yang tertangani	$(\text{Jumlah korban tindak kekerasan yang tertangani} / \text{Jumlah korban tindak kekerasan yang ada}) \times 100\%$	100	%	
		Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	$(\text{Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi} / \text{Jumlah PPKS yang seharusnya mendapat pelayanan dan direhabilitasi}) \times 100\%$	100	%	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	$(\text{Jumlah PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial} / \text{Jumlah PPKS yang seharusnya mendapat perlindungan dan jaminan sosial}) \times 100\%$	100	%	
	2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Penilaian dari Inspektorat	84,80	%	
		Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai SKM lingkup Perangkat Daerah	83,34	%	
Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	3. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$(\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial} / \text{jumlah keseluruhan PSKS}) \times 100\%$	100	%	
		Prosentase korban bencana yang tertangani	$(\text{Jumlah korban bencana yang tertangani} / \text{Jumlah korban bencana yang ada}) \times 100\%$	100	%	
		Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	TMP yang dikelola	1	TMP	

### **3.5 PENGHARGAAN DAN INOVASI**

#### PENGHARGAAN YANG DICAPAI :

1. PKH Award katagori verifikasi terbaik Tingkat Nasional Tahun 2012.
2. Karang Taruna “ Tunas Harapan “ Desa Mungli Kecamatan Kalitengah berprestasi Tingkat Nasional (10 Besar Tingkat Nasional) Tahun 2012.
3. Penghargaan KUBE terbaik tingkat nasional tahun 2015.
4. Penghargaan KUBE terbaik ke-3 tingkat Jawa Timur tahun 2017.
5. Penghargaan Pendamping Eks Pasung Jawa Timur tahun 2017.
6. Penghargaan terbaik ke-3 Jawa Timur tahun 2017 Penyaluran dan Pelunasan Tebusan Rastra.
7. Penghargaan Lomba Ayo Inklusif tahun 2018, Program Aku Bisa Teman (Bina Disabilitas Sejahtera Mandiri dan Bahagia).
8. Juara III Pilar Sosial TKSK Jawa Timur tahun 2018.
9. Juara I Penyuluh Agama Islam Tk. Nasional tahun 2018 Pengasuh LKS Format a.n Mukhlis Sajaya.
10. Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Nasional dari Menteri Sosial RI tahun 2021 untuk SDH PKH Kec. Laren Kab. Lamongan a.n Nastainul Hasan, S.Pd.
11. Juara I Lomba Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 LKSA AISYIYAH Babat Lamongan.
12. Desember 2022 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di nyatakan “ KOMPETEN “ angkatan 22 dan 23 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial RI.
13. Tahun 2023, Juara 2 Pilar Sosial Tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu LKS/PA. Muhammadiyah Paciran.
14. Tahun 2023, mendapat Piagam Penghargaan Gubernur Jatim atas partisipasi dan dukungan pada rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi Jatim melalui kegiatan Lintas Batas Disabilitas Tahun 2023.

15. Tahun 2024, mendapatkan Piagam Penghargaan Dari Ombudsman atas Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2024

16. Tahun 2025, mendapat Piagam Penghargaan dari Bupati Lamongan atas prestasinya dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

**PENGHARGAAN  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGHARGAAN	BIDANG	DARI	KEPADA	TANGGAL	TEMPAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Dinas Sosial	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian Kinerja Organisasi	Bupati Lamongan	Dinas Sosial	6 Maret 2025	Lamongan
2	Dinas Sosial	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Pelayanan Publik	OMBUDSMAN	Dinas Sosial	12 November 2024	Jakarta

Piagam Penghargaan Dari Ombudsman atas Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2024



Piagam Penghargaan dari Bupati Lamongan atas prestasinya dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.



**INOVASI DINSOS TAHUN 2025 :**

NO	NAMA INOVASI	PENYELENGGARA INOVASI	BENTUK INOVASI
[1]	[2]	[3]	[4]
1	CEMPAKA (Cepat, Empati Melayani Kelompok Rentan)	Dinas Sosial	Bantuan ini Untuk mendukung perlindungan korban bencana alam sosial, untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok masyarakat korban sosial dan alam agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan lancar secara wajar dan kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi
2	"PERETAS" (PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS)	Dinas Sosial	Dalam melaksanakan kegiatan inovasi PERETAS (Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas) memiliki tujuan yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengentaskan Kemiskinan.</li><li>2. Mengembangkan Usaha.</li><li>3. Mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan</li><li>4. Keluarga penyandang disabilitas mendukung terhadap klien disabilitas.</li></ol> Termotivasinya semua pihak untuk ikut peduli terhadap permasalahan rehabilitasi sosial.

1. Program Kesejahteraan Lansia (ROSELA), yaitu Bantuan makanan siap makan pada 61 lansia di 8 Kelurahan.



2. Program Yakin Semua Sejahtera (YSS), yaitu Bantuan modal usaha pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) pada 32 orang.



3. Program BLT Sembako Kelurahan, yaitu Bantuan sosial sembako pada masyarakat miskin tingkat kelurahan. Jumlah penerima sebanyak 80 orang di 12 kelurahan.



4. Program Bantuan untuk Kelompok Rentan ( CEMPAKA - Cepat, Empati Melayani Kelompok Rentan ), yaitu bantuan untuk mendorong pemulihan Ekonomi Masyarakat, mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan khususnya bagi kelompok rentan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jumlah penerima 30 Orang desa Blajo Kecamatan Kalitengah di tahun 2025.



**BAB IV****CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Program Pembantuan yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan bidang sosial pada tahun 2024. Adapun Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN, Dekon, APB Prop. Adalah sebagai berikut :

**4.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :**

- a. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM)
- b. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan)
- c. DITJEN Penanganan Fakmis Kementerian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako)

**4.2 Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan :**

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

**4.3 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :****A. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial****Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Kegiatan Keluarga Harapan (PKH);
2. Kegiatan PBI JKN.

**B. Bidang Penanganan Fakmis****Program Perlindungan dan Jaminan Sosial****Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota****Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

1. Kegiatan Bantuan Sembako.

**C. Bidang Rehabilitasi Sosial****Program Rehabilitasi Sosial**

1. Kegiatan Penyandang Disabilitas yaitu : ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan.

**D. Bidang Pemberdayaan Sosial****Program Pemberdayaan Sosial**

1. TKSK.

**1. Sumber dan Jumlah Anggaran :****A. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran pembangunan sebagaimana terlampir ditabel.
2. Kegiatan PBI JKN dengan dana APBN , sebagaimana terlampir ditabel.

**B. Bidang Penanganan Fakmis**

Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN , dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir ditabel. Adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

**C. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir ditabel.

**D. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan Dana Dekon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.000.000,- atau 100%.

**TUGAS PEMBANTUAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2024**

No	Urusan	Program	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lokasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Penyediaan Alat Bantu Mobilisasi Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Rehabilitasi Sosial	- Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 - Pergub Jatim No. 28 Tahun 2020	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Dinas Sosial	APBD-Prov	38 orang	38 orang	Kabupaten Lamongan
2	Program Keluarga Harapan (PKH) Plus	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Dinas Sosial	APBD-Prov	2756 KPM	2714 KPM	Kabupaten Lamongan
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	APBN	61542 KPM	60042 KPM	Kabupaten Lamongan
4	BPNT/Sembako	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	APBN	94676 KK	93886 KK	Kabupaten Lamongan
5	KIP PUTRI JAWARA	Pemberdayaan Sosial	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/846/013/2025	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Dinas Sosial	APBD-Prov	200 orang	200 orang	Kabupaten Lamongan

**BAB V  
PENUTUP**

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ-PD) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah merupakan upaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ-PD) Tahun Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dari segi dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran kinerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar **Rp.21.385.936.307,-** dan realisasi sebesar **Rp.20.383.507.749,-** atau **95,22%** dan Capaian kinerja 2025 sebesar 131,21% dengan realisasi kinerja 109,17% dari target 83,20%. Keberhasilan tersebut ini berada pada :

1. Adanya Program Kemiskinan Ekstrim melalui anggaran APBDProv. dengan jumlah penerima bansos sebanyak 2.346 orang;
2. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Program Kesejahteraan Lansia (ROSELA), yaitu Bantuan makanan siap makan pada 61 lansia di 8 Kelurahan.
3. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Permakanan pada Lansia berupa Sembako untuk 670 lansia di 10 Kecamatan.
4. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Pemberian Sandang pada Anak asuh Keluarga Miskin berupa Peralatan Ibadah untuk 45 anak.
5. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Yakin Semua Sejahtera (YSS), yaitu Bantuan modal usaha pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) pada 32 orang.
6. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu BLT Sembako Kelurahan, yaitu Bantuan sosial sembako pada masyarakat miskin tingkat kelurahan. Jumlah penerima sebanyak 80 orang di 8 kelurahan.
7. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Bantuan Sosial Bencana (BASOCANA) Permakanan dan Sandang. Basocana tersebut merupakan bantuan sosial yang diberikan karena adanya kondisi insidental sewaktu-waktu terjadi bencana sosial

seperti halnya kebakaran dan bencana alam banjir/tanah longsor/puting beliung yang tidak menerima bantuan CBP yang ditetapkan dengan SK Tanggap Darurat. Pada tahun 2025, Kab.Lamongan tidak mengalami bencana besar yang beresiko tinggi sehingga tidak ada bantuan CBP yang di SK kan dengan SK Tanggap Darurat.

8. Adanya Bansos yang didanai APBN, APBDProv, seperti Bantuan Sembako /BPNT, PKH, PKH Plus, Bansos Disabilitas (ASPD).
9. Adanya Program Nasional BLT Cukai (BDHCHT) yaitu bantuan uang pada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau sebanyak 14.684 orang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah (LKPJ-PD) Tahun 2025 dan semoga dapat dijadikan pedoman.

Lamongan, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**

**GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.E., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800117 200312 1 003